Isu Sepekan
Bidang Ekkuinbang, Komisi XI
Minggu ke-5 Maret
(25 s.d. 31 Maret 2022)
2022

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

FENOMENA INVESTASI ILEGAL DI TENGAH PEMULIHAN EKONOMI

Edmira Rivani
Peneliti Madya
edmira.rivani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Media dalam negeri sepanjang Maret 2022 ini sering memberitakan tentang investasi melalui aplikasi digital dengan modus penipuan. Bagaikan efek domino, pengungkapan kasus pertama langsung diikuti oleh pengungkapan kasus-kasus berikutnya dengan konstruksi persoalan yang sama. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, Satgas Waspada Investasi (SWI) melaporkan bahwa dana masyarakat sebesar Rp117,5 triliun tersangkut dalam investasi ilegal. Meskipun angkanya fantastis, bisa saja kerugian sebenarnya jauh lebih besar mengingat beberapa kasus saja yang sedang masuk proses hukum. Data dari Satgas Waspada Investasi yang terakhir diperbaharui awal tahun ini mencatat bahwa jumlah entitas penyedia investasi ilegal mencapai 1.086, jumlah tersebut belum termasuk yang di luar radar SWI. Dari 1.086 entitas yang menawarkan investasi ilegal, dua pertiga merupakan perusahaan penyedia layanan *forex* dan perdagangan berjangka, secara rinci berjumlah 628 perusahaan. Sementara itu, entitas yang diketahui melakukan penipuan dengan tawaran *money games*/skema ponzi berjumlah 212 entitas. SWI juga mencatat bahwa terdapat 73 entitas investasi ilegal yang bergerak di aset *crypto*. Selain itu terdapat pula 80 perusahaan *Multi Level Marketing* (MLM) dan 93 sisanya yang menawarkan investasi ilegal bergerak di bidang lain termasuk investasi properti, *crowdfunding*, dan asuransi. Meskipun sudah masuk dalam radar SWI dan disasar oleh penegak hukum di Indonesia, para pelaku bisnis investasi ilegal ini tidak pernah jera. Jika hari ini diblokir, mungkin besok atau beberapa waktu kemudian, perusahaan akan melakukan *rebranding* atau mengganti *domain* situs.

Maraknya kasus investasi ilegal dengan kerugian triliunan rupiah ini terhitung anomali. Dimana, pengetahuan dan pemahaman keuangan masyarakat Indonesia seputar investasi masih terbilang rendah, namun semangat dan keinginan untuk meningkatkan kondisi perekonomian cukup tinggi. Tercermin dari hasil survei literasi dan inklusi keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, inklusi keuangan Indonesia mencapai 76 persen, berbanding terbalik dengan literasinya yang hanya mencapai 38 persen. Aparat hukum dan lembaga terkait sudah bekerja keras dalam memberantas investasi ilegal, namun perlu peningkatan kinerja agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara tuntas, sehingga masyarakat aman dalam melakukan investasi. Apalagi di era digital saat ini, di mana informasi dapat tersiar secara kilat. Pemahaman investasi yang minim serta penetrasi sosial media yang tinggi, merupakan salah satu media penyebaran disinformasi paling besar, menjadikan masyarakat tertipu dan mengalami kerugian fantastis. Selain itu, *platform* investasi ilegal banyak dibantu oleh *endorsement* yang dilakukan oleh para *influencer* di berbagai media sosial termasuk Instagram, Facebook dan YouTube. Mereka secara bebas memberikan rekomendasi investasi ilegal atau judi yang keberadaannya sudah jelas melanggar hukum di Indonesia.

Upaya pemulihan ekonomi sudah tertekan dengan kenaikan harga komoditas seperti bahan pangan hingga minyak yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Upaya tersebut semakin tertekan dengan adanya kasus investasi ilegal yang banyak terjadi akhir-akhir ini. Daya beli seharusnya dapat dijaga dengan kenaikan pendapatan masyarakat baik karena aktivitas usaha maupun bentuk pendapatan tambahan lainnya seperti dari investasi atau produk lainnya.

Nyatanya, akibat kasus-kasus investasi ilegal ini, triliunan rupiah tersangkut dalam investasi ilegal yang seharusnya digunakan untuk pemenuhan konsumsi untuk mendorong roda perekonomian. Masyarakat yang menjadi korban penipuan investasi ilegal ini pada umumnya merupakan kelas menengah yang menjadi simpul kekuatan untuk meningkatkan konsumsi. Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah perlu lebih giat lagi mengedukasi masyarakat dengan mengambil pelajaran dari kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Metode komunikasi yang sering menggunakan imbauan di media konvensional bisa dikaji kembali, karena tidak sebanding dengan peran *influencer* yang berkembang sangat pesat.

Atensi DPR

Perubahan era digital meningkatkan minat generasi Z dan milenial untuk berinvestasi melalui *platform* digital. Menyikapi kecenderungan itu, DPR RI dalam hal ini Komisi XI perlu memberikan atensi melalui fungsi konstitusionalnya untuk memastikan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, dengan mewujudkan iklim investasi yang kondusif melalui upaya menyiapkan secepatnya regulasi yang terintegrasi dan tidak memberikan peluang bagi penyelenggara investasi ilegal untuk merugikan masyarakat.

Komisi XI perlu mendorong OJK untuk melakukan peningkatan literasi keuangan melalui edukasi perihal investasi ilegal sehingga jargon "Legal dan Logis" menjadi perhatian bagi masyarakat dalam berinvestasi. Selanjutnya, OJK juga harus melakukan peningkatan penegakan hukum, seperti meningkatkan lagi hubungan kerja sama dengan lembaga lainnya yang tergabung dalam wadah SWI serta penguatan kinerja Satgas di daerah yang memahami kondisi masyarakat setempat. Tidak kalah penting, memperberat sanksi-sanksi bagi pelaku kejahatan investasi ilegal agar dapat memberikan efek jera bagi para pelaku.

Sumber

cnbc.com, 25 Maret 2022;
detik.com, 28 Maret 2022;
kompas.com, 29 Maret 2022;
Kontan, 26 Maret 2022;
republika.co.id, 29 Maret 2022

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

https://puslit.dpr.go.id
@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Sri Nurhayati Q.
Dian Cahyaningrum
Dewi Wuryandani
Izzaty

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022